

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERBEDAAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2002 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Propinsi NTT

Alphons M R Putra
NIM : 01 2114 104
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007

Saat ini Negara Republik Indonesia sedang berada pada tahap pembangunan atau sering disebut sebagai negara berkembang. Modal utama pembangunan saat ini ialah anggaran pembangunan yang banyak diperoleh dari sektor pajak. Terdapat berbagai macam pungutan pajak di Indonesia, salah satunya ialah Pajak Kendaraan Bermotor. Di tiap-tiap Propinsi di Indonesia, terdapat Peraturan Daerah yang mengatur kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Demikian halnya yang dibuat oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur, yakni dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuannya agar pemerintah tersebut secara jelas dan sesuai hukum, dapat menarik pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui besarnya prosentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dan membandingkan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002.

Hasil perhitungan prosentase kontribusi menunjukkan, telah terjadi fluktuasi tingkat prosentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 1998 sampai tahun 2005. Diantaranya telah terjadi peningkatan kontribusi mencapai 33,5% pada tahun 2000 dan terjadi penurunan kontribusi menjadi 17,5% pada tahun 2002.

Pada pengujian hipotesis dengan Man-Whitney U Test untuk mengetahui tingkat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah, diperoleh nilai *asympt.sig(2-tailed)* sebesar 0,021 yang berarti nilai ini lebih kecil dari nilai kritis 0,05, sehingga keputusan yang diambil ialah menolak H_0 . Berdasarkan keputusan tersebut, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CONTRIBUTION AND DIFFERENCES OF VEHICLE TAX
REVENUE BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REGULATION OF EAST NUSA TENGGARA PROVINCE
NO.1 YEAR 2002 ABOUT VEHICLE TAX
A Case Study at Regional Revenue Office in East Nusa Tenggara Province

Alphons M R Putra
NIM : 01 2114 104
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007

At present, Indonesia is known as one of development countries in the world. The main capital for the development in this country comes from the taxation. There are various tax objects, and the ownership of a vehicle is one of them. In order to administrate this taxation, every province in Indonesia issued a particular regulation, which in East Nusa Tenggara province, it is known as Regional Regulation no.1 year 2002. The purpose of this regulation is to enable the government to legally collect the tax on the ownership of a vehicle within the province.

The aims of this research were firstly to know the percentage of contribution of vehicle tax revenue to the regional income, and to compare the amount of the vehicle tax revenue in this province, before and after the implementation of regional regulation no.1 year 2002.

The result showed that there was a fluctuation on the level of percentage of vehicle tax's contribution to the regional income, from the year of 1998 to 2005. It was revealed that there was an increase up to 33.5% in 2000 and a decrease down to 17.5% in 2002.

The test of hypothesis using Man-Whitney U Test, to know the difference in vehicle tax revenue before and after the implementation of regional regulation no.1 year 2002, resulted the value of *asympt.sig (2-tailed)* as 0.021 which meant that the value was bigger than the critical value 0.05. Hence the H₀ was rejected. Based on that decision, it was concluded that there was a significant difference between the vehicle tax revenue before the implementation of regional regulation no.1 year 2002 and the vehicle tax revenue after the regulation was imposed.